

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Dalam artikel “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009” yang diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia, disebutkan bahwa hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Indonesia juga ditempatkan dalam peringkat kedua setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati dengan luas daratan sebesar 1.860.359,67 km<sup>2</sup>, wilayah perairan seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>, serta 81.000 km garis pantai. Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia terdiri dari 10 persen spesies tanaman berbunga, 12 persen spesies mamalia, 16 persen spesies reptil dan amfibi, 17 persen spesies burung, dan 25 persen spesies ikan yang terdapat di dunia.<sup>1</sup>

Hutan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya yaitu minyak kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia telah mendominasi pasar dalam ekspor minyak kelapa sawit sejak pertengahan tahun 1960-an. Kedua negara tersebut telah menyumbangkan 90 persen dalam ekspor kelapa sawit. Pada tahun 2012 Indonesia menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan ekspor sebanyak 31,7 juta ton pada periode 2012/2013 dan terus meningkat hingga 39 juta ton pada periode 2016/2017.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wirendro Sumargo, “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009”, (Forest Watch Indonesia, 2011). Hal. 1.

<sup>2</sup> Retno Kusumaningtyas, “Toward Responsible and Inclusive Financing of The Palm Oil Sector”, (Center for International Forestry Research. ISBN 978-602-387-058-5), Hal. 2.

Dalam memenuhi permintaan global, Indonesia memperluas area perkebunan kelapa sawit dengan cara menggunduli hutan atau yang dikenal juga dengan istilah deforestasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan deforestasi merupakan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Setiap tahunnya luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu meningkat, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2013, lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar. Luas lahan perkebunan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 11,26 juta hektar, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi seluas 11,20 juta hektar. Namun luas lahan perkebunan kelapa sawit kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 12,30 juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia melaporkan penghancuran hutan hujan Indonesia sejak tahun 1990 hingga 2015 telah mencapai 24 juta hektar, dan 19 persen deforestasi yang dilakukan antara tahun 2015 hingga 2017 terjadi di konsesi kelapa sawit.<sup>3</sup>

Deforestasi di Indonesia tiap tahunnya selalu terjadi. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya kawasan hutan di Indonesia. Indonesia mengalami deforestasi seluas 397.370,9 hektar pada tahun 2013-2014, 1.092.191,5 hektar pada periode 2014-2015, 629.176,9 hektar pada periode 2015-2016, 480.010,8 hektar pada periode 2016-2017, dan 439.439,1 hektar pada periode 2017-2018.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Arief Virgy, "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International", (Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2. Januari, 2020), Hal. 75

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013 – 2018 (Ha/Th)".  
<https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2018-ha-th.html> (Diakses pada 26 Maret 2020)

Isu ini pun menjadi perhatian bagi International Non Governmental Organization (INGO) yang berfokus pada isu lingkungan. Greenpeace merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah terbesar yang berkampanye untuk permasalahan lingkungan hidup dalam skala global. Hingga saat ini, Greenpeace selalu melakukan kampanye mengenai perlindungan hutan dari aktivitas yang menimbulkan deforestasi atau yang dikenal juga dengan istilah *zero deforestation*. Greenpeace berdiri pada tahun 1971 yang awal pendiriannya bertujuan untuk menghentikan uji coba bom nuklir oleh pemerintah Amerika Serikat di Amchitka, Alaska. Selain menghentikan uji coba bom nuklir, saat ini Greenpeace juga bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, mencegah polusi dan penyalahgunaan lingkungan, serta mempromosikan kedamaian dan pelucutan senjata.<sup>5</sup> Hingga saat ini, Greenpeace telah hadir di 55 negara di Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan Pasifik. Kantor pusat dari Greenpeace sendiri berlokasi di Amsterdam, Belanda.<sup>6</sup>

Dalam perjalanannya, Greenpeace melakukan berbagai macam advokasi mengenai permasalahan lingkungan hidup dan berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan negara maupun perusahaan multinasional. Seperti pada tahun 2012, Greenpeace yang melakukan advokasi untuk penetapan kebijakan *zero deforestation* berhasil mempengaruhi Danone hingga perusahaan tersebut

---

<sup>5</sup> Greenpeace International, “Who We Are”.  
<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/>. (Diakses pada 26 Maret 2020).

<sup>6</sup> Greenpeace International, “Our Offices”.  
<https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/> (Diakses pada 26 Maret 2020)

melakukan pemutusan rantai pasokan komoditas kertas terhadap oknum yang berkontribusi dalam deforestasi.<sup>7</sup>

Pada tahun 2000, Greenpeace secara resmi memasuki kawasan Asia Tenggara dan berdiri di Indonesia pada tahun 2005. Indonesia ikut menjadi fokus utama Greenpeace dikarenakan melihat banyaknya populasi spesies tanaman dan hewan di kawasan ini yang menjadi terancam akibat adanya perubahan iklim dan deforestasi.<sup>8</sup> Greenpeace juga ikut memperhatikan isu deforestasi yang terjadi di Indonesia akibat industri kelapa sawit. Aktor utama yang disorot oleh Greenpeace dalam masalah tersebut yaitu Wilmar International yang merupakan sebuah Multinational Corporation (MNC). Wilmar International merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas 40 persen perdagangan minyak kelapa sawit. Wilmar juga menjadi akses utama bagi produsen-produsen kelapa sawit untuk memasuki pasar. Hal tersebut terbukti dengan 80 persen pasokan minyak kelapa sawit yang diperdagangkan oleh Wilmar berasal dari pihak ketiga.<sup>9</sup> Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Auriga, terdapat tiga korporasi dengan kapasitas kilang yang cukup besar dan mendominasi ekspor minyak sawit dari Indonesia. Salah satunya yaitu Wilmar dengan 13,18 juta ton kapasitas kilang dan 2,71 juta ton kapasitas pabrik pengolahan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Greenpeace International, "History and Successes".

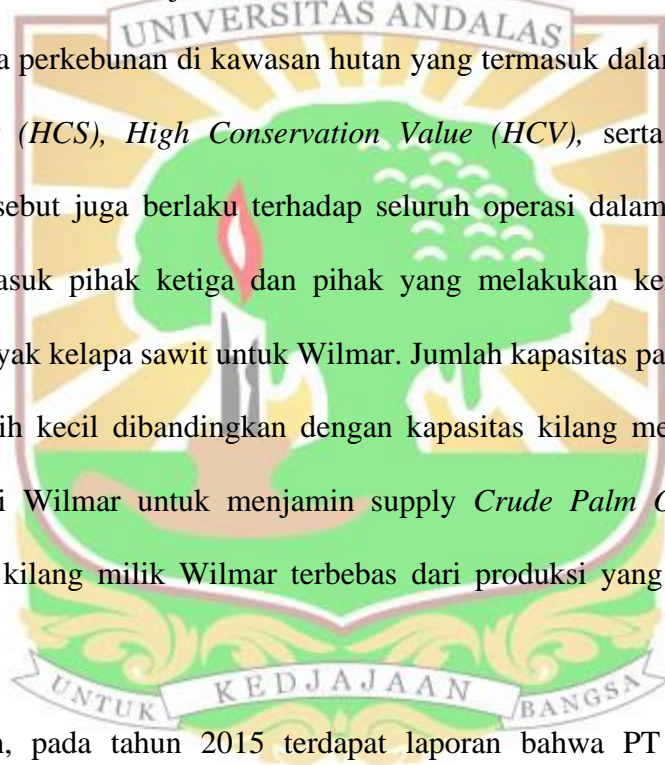
[http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/594418/Greenpeace/#vars!date=2018-01-13\\_13:43:08!](http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/594418/Greenpeace/#vars!date=2018-01-13_13:43:08!)  
(Dikases pada 1 Mei 2020)

<sup>8</sup> Bella Putri, "Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia", (JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni, 2019), Hal. 9.

<sup>9</sup> Muhammad Arief Virgy, "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International", (Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2. Januari, 2020), Hal. 75.

<sup>10</sup> Romain Pirard, "Kepemilikan dan Dominasi Korporasi Pada Rantai Pasok Minyak Sawit di Indonesia", (Trase, Auriga, dan Universitas Santa Barbara, Januari, 2020), Hal. 6

Pada Desember 2013, Wilmar International mengeluarkan kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) menimbang banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh deforestasi.<sup>11</sup> Kebijakan tersebut juga dikeluarkan demi mencapai *zero net deforestation* pada tahun 2020 sebagai anggota Consumer Goods Forum. Melalui kebijakan tersebut, Wilmar International menyatakan tidak akan membuka perkebunan di kawasan hutan yang termasuk dalam kategori *High Carbon Stock (HCS)*, *High Conservation Value (HCV)*, serta lahan gambut. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap seluruh operasi dalam rantai pasokan Wilmar, termasuk pihak ketiga dan pihak yang melakukan kerjasama dengan memasok minyak kelapa sawit untuk Wilmar. Jumlah kapasitas pabrik pengolahan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas kilang menjadi tantangan tersendiri bagi Wilmar untuk menjamin supply *Crude Palm Oil (CPO)* yang diterima oleh kilang milik Wilmar terbebas dari produksi yang mengakibatkan deforestasi.<sup>12</sup>



Namun, pada tahun 2015 terdapat laporan bahwa PT Patiware yang merupakan anak perusahaan dari Ganda Group dan Provident Agro Group serta merupakan pemasok minyak bagi Wilmar melakukan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat.<sup>13</sup> Ditambah lagi pada tahun 2018, Greenpeace melaporkan

---

<sup>11</sup> Wilmar International, “*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*”, (Desember, 2013). <https://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf>. (Diakses pada 27 Maret 2020).

<sup>12</sup> Rory Padfield, “*Landscape in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry*”, (Landscape Research, Mei, 2016), Hal. 6.

<sup>13</sup> Greenomics Indonesia, “*Grievance Report: Wilmar is Listed as the Largest Buyer of Palm Oil from Two Important Suppliers that Continue to Clear Forested Peatlands in Sumatra and Borneo, Indonesia*”, Juni, 2015. [http://www.greenomics.org/docs/The%20Grievance%20Report\\_Wilmar%20cases\\_Greenomics\\_30June2015.pdf](http://www.greenomics.org/docs/The%20Grievance%20Report_Wilmar%20cases_Greenomics_30June2015.pdf) (Diakses 27 Maret 2020)

bahwa Gama yang merupakan perusahaan minyak sawit dan dijalankan oleh eksekutif senior Wilmar International telah menghancurkan sekitar 21.500 hektar hutan Indonesia untuk dijadikan lahan perkebunan sawit.<sup>14</sup>

Laporan tersebut mengakibatkan Greenpeace mendesak Wilmar untuk segera mempublikasikan peta-peta konsesi guna mengetahui seluruh operasi dan memutus rantai pasok dengan produsen yang terbukti melakukan deforestasi. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Wilmar dengan alasan publikasi tersebut memerlukan perizinan dari kepala daerah setempat.<sup>15</sup>

Melalui siaran pers yang diadakan oleh Greenpeace pada 4 April 2020 di Jakarta, mereka menyatakan bahwa Wilmar telah gagal menjalankan *High Carbon Stock Approach (HCSA)* yang merupakan salah satu standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam mengatasi permasalahan deforestasi. Hingga pada akhirnya Wilmar menyatakan pengunduran diri dari keanggotaan komite HCSA setelah gagal membuktikan diri bahwa mereka aktif dalam menjalankan prinsip HCSA. Hal tersebut menjadi langkah mundur bagi Wilmar dalam menyelesaikan masalah deforestasi terkait kelapa sawit.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Greenpeace Indonesia, "Hutan Seluas Dua Kali Lipat Ukuran Kota Paris Dihancurkan Perusahaan Kelapa Sawit Terbesar Di Dunia", Juli, 2018.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1095/hutan-seluas-dua-kali-lipat-ukuran-kota-paris-dihancurkan-perusahaan-kelapa-sawit-terbesar-dunia/> (Diakses 27 Maret 2020)

<sup>15</sup> Muhammad Arief Virgy, "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International", (Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2, Januari, 2020), Hal. 76.

<sup>16</sup> Greenpeace Indonesia, "Pengunduran Diri Wilmar International dari Keanggotaan HCSA Menandai Kegagalan Perusahaan dalam Komitmen Mengakhiri Deforestasi". April, 2020. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4966/pengunduran-diri-wilmar-international-dari-keanggotaan-hcsa-menandai-keagalannya-dalam-mengakhiri-deforestasi/> (Diakses 13 Oktober 2020)

Greenpeace juga menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak berupaya dalam mengatasi permasalahan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Dalam siaran pers yang dilakukan oleh Greenpeace pada tahun 2019, Greenpeace menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia berupaya menghalangi reformasi industri kelapa sawit dengan cara memberikan instruksi kepada perusahaan kelapa sawit untuk tidak membagikan informasi mengenai konsesi kelapa sawit yang mereka miliki. Padahal Mahkamah Agung Indonesia telah memutuskan bahwa Pemerintah Indonesia harus menyediakan informasi mengenai peta konsesi kelapa sawit untuk publik.<sup>17</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Pada tahun 2013, Wilmar mengeluarkan kebijakan NDPE dalam menanggapi isu deforestasi. Namun, pada tahun 2015 terdapat laporan bahwa PT Patiware yang merupakan pemasok minyak bagi Wilmar melakukan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat. Ditambah lagi pada tahun 2018, Greenpeace melaporkan bahwa Gama yang merupakan perusahaan minyak sawit dan dijalankan oleh eksekutif senior Wilmar International telah menghancurkan sekitar 21.500 hektar hutan Indonesia untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Greenpeace mendesak Wilmar untuk segera mempublikasikan peta konsesi kelapa sawitnya guna mengetahui seluruh operasi dan memutus rantai pasok dengan produsen yang terbukti melakukan deforestasi. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Wilmar dengan alasan publikasi tersebut memerlukan perizinan dari kepala daerah

---

<sup>17</sup> Greenpeace Indonesia, *“Pemerintah Indonesia Secara Aktif Memblokir Upaya Reformasi Industri Kelapa Sawit”*, (Greenpeace Indonesia, Mei, 2019).  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2876/pemerintah-indonesia-secara-aktif-memblokir-upaya-reformasi-industri-kelapa-sawit/> (Diakses 3 Agustus 2020)

setempat. Greenpeace menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia pun berupaya menghalangi reformasi industri kelapa sawit dengan cara memberikan instruksi kepada perusahaan kelapa sawit untuk tidak membagikan informasi mengenai konsesi kelapa sawit yang mereka miliki. Permasalahan tersebut menjadi hambatan bagi Greenpeace dalam menerapkan konsep *zero deforestasi*.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

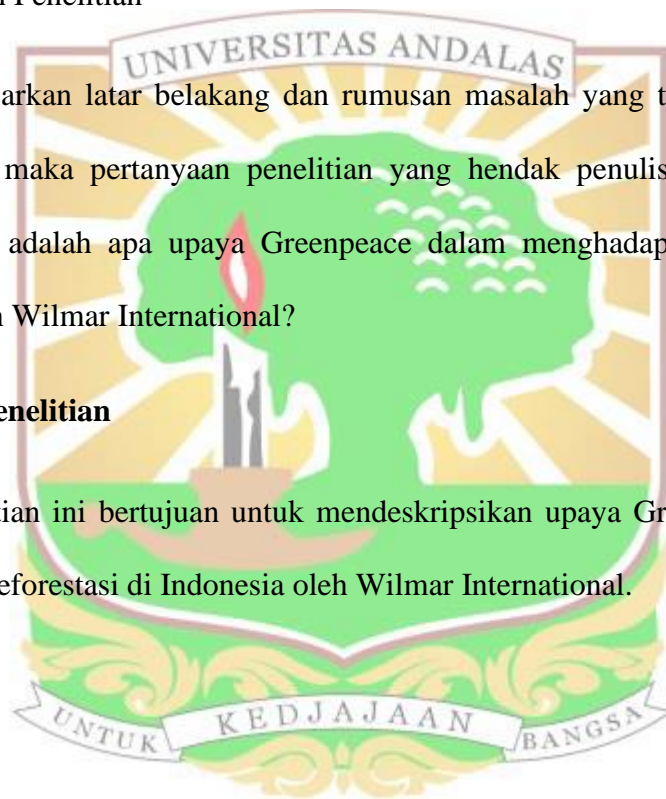
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka pertanyaan penelitian yang hendak penulis jawab melalui penelitian ini adalah apa upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian Hubungan Internasional dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian berikutnya.
2. Menjadi salah satu sumber referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional terutama di Universitas Andalas.





## 1.6.Studi Pustaka

Dalam menganalisa permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan berbagai sumber sebagai acuan. Penelitian pertama yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Bella Putri dengan judul *Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*.<sup>18</sup> Penelitian tersebut membahas tentang upaya Greenpeace serta Indonesia dalam menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Keanekaragaman hayati di Indonesia yang rusak oleh deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan menjadi alasan bagi Greenpeace untuk memperhatikan masalah lingkungan hidup di Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan One Map Policy (OMP) sebagai solusi untuk konflik pemanfaatan ruang dan penggunaan informasi geospasial agar dapat meminimalisir deforestasi akibat konflik lahan. Struktur kerja terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut telah dibentuk, namun kebijakan tersebut belum juga terealisasi hingga tahun 2017. Melihat kondisi tersebut, Greenpeace ikut mengambil peran dalam menangani kebakaran hutan di Indonesia. Greenpeace melakukan beberapa kampanye seperti Kampanye Hutan Tanpa Api dan Kampanye #KepoItuBaik. Selain kampanye, Greenpeace juga melakukan advokasi hukum terhadap pemerintah Indonesia, menerbitkan Peta Kepo Hutan, mengadakan program Tiger Challenge, melakukan pendekatan HCS, membentuk Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui

---

<sup>18</sup> Bella Putri, “*Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*”, (JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni, 2019), Hal. 1.

metode–metode yang digunakan Greenpeace dalam mengatasi masalah deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Penelitian ini juga membantu penulis untuk memahami kebijakan One Map Policy oleh presiden Indonesia Joko Widodo dalam mengurangi deforestasi di Indonesia. Penelitian ini akan dijadikan acuan untuk melanjutkan penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Penelitian kedua ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan dengan judul *Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International*.<sup>19</sup> Wilmar International merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab terhadap 40% aktivitas perdagangan global. Wilmar International mengeluarkan kebijakan NDPE. Greenpeace menanggapi kebijakan tersebut dengan menuntut Wilmar International untuk mempublikasikan peta-peta konsesi yang bertujuan melihat seluruh operasi dan memutus rantai pasokan dengan produsen yang melakukan deforestasi. Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Wilmar International sehingga kebijakan NDPE dinilai tidak berjalan semestinya.

Melihat kondisi tersebut, Greenpeace mempublikasikan beberapa laporan di akun sosial media dan halaman resmi Greenpeace Indonesia terkait kasus deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Strategi *information politics* tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan bersifat ilmiah. Selanjutnya Greenpeace menggunakan taktik *Blanket Strategy* dengan mempublikasikan data dan fakta mengenai rantai pasokan minyak kelapa sawit dari Wilmar International hingga ke

---

<sup>19</sup> Muhammad Arief Virgy, “*Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International*”, (Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2. Januari, 2020), Hal. 74.

konsumen seperti Nestle Oil, Mondelez International, dan produk lainnya. Selain itu, Greenpeace juga menggunakan *symbolic politics*, *leverage politics*, serta *accountability politics* guna menghimpun kekuatan dalam menghadapi Wilmar International. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat strategi advokasi apa saja yang digunakan oleh Greenpeace dalam menghadapi deforestasi oleh Wilmar International.

Penelitian ketiga ditulis oleh Retno Kusumaningtyas dan Jan Willem van Gelder yang berjudul *Towards Responsible and Inclusive Financing of The Palm Oil Sector*.<sup>20</sup> Secara garis besar, penelitian ini menjelaskan tentang supply chain pasar global terhadap minyak kelapa sawit. Ekspor pasar global terhadap minyak kelapa sawit mengalami peningkatan sejak tahun 1960an hingga sekarang. Pada awal tahun 1960 terdapat 600.000 ton ekspor minyak kelapa sawit dalam pasar global, meningkat hingga 8.5 juta ton pada tahun 1990, dan 46 juta ton pada tahun 2015. Indonesia dan Malaysia mendominasi sebanyak 90 persen dari ekspor minyak kelapa sawit tersebut. Sejak tahun 2012, Indonesia telah menjadi negara terbesar dalam ekspor minyak kelapa sawit. Indonesia melakukan ekspor sebanyak 22,1 juta ton pada tahun 2012 dan terus mengalami peningkatan hingga 27,4 juta ton pada tahun 2016. Selain menjadi negara terbesar dalam produksi dan ekspor minyak kelapa sawit, Indonesia juga menjadi negara terbesar yang mengkonsumsi minyak kelapa sawit. Pada tahun 2007, Indonesia mengkonsumsi minyak kelapa sawit sebanyak 5,3 juta ton dan terus meningkat hingga 11,7 juta ton pada tahun 2016.

---

<sup>20</sup> Retno Kusumaningtyas, "*Towards Responsible and Inclusive Financing of The Palm Oil Sector*", (Center for International Forestry Research, ISBN 978-602-387-058-5), Hal. 1

Lima negara terbesar yang melakukan impor terhadap minyak kelapa sawit yaitu India, Europe, China, Pakistan, dan Amerika Serikat.

Supply chain minyak kelapa sawit sedikit rumit karena proses produksinya selalu berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. *Fresh fruit bunches* dipanen di perkebunan setiap 10 hingga 12 hari setelah penanaman. Hasil panen tersebut kemudian dikirim ke pabrik untuk digiling dan disterilkan. Hasil penggilingan tersebut yang dinamakan CPO dikirim lagi ke kilang minyak untuk diproses lebih jauh secara kimiawi. Kemudian, hasil proses tersebut dikirim kepada perusahaan produksi untuk dijadikan berbagai macam produk. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat bagaimana rantai pasokan atau supply chain dari proses produksi hingga ekspor dan impor minyak kelapa sawit.

Penelitian keempat ditulis oleh Muhammad Risal dengan judul *Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi*.<sup>21</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang peran MNC dalam ekonomi global dan dampak keterlibatan MNC di perkebunan kelapa sawit Kalimantan. MNC adalah perusahaan yang melakukan kontrol dan kelola produksi oleh pabrik mereka di dua negara atau lebih. MNC pada umumnya bergerak pada produksi ekonomi, investasi lintas batas dan perdagangan internasional. MNC akan lebih memilih untuk memperluas dan mengembangkan sumber daya mereka di negara-negara berkembang dengan hambatan-hambatan minimal agar dapat mempermudah kegiatan produksi. Faktor geografis merupakan salah satu alasan MNC tertarik untuk melakukan

---

<sup>21</sup> Muhammad Risal, "*Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi*", (Jurnal Interdependence Vol. 3, No. 1, Januari-April, 2015), Hal. 1.

produksinya di Kalimantan. Lahan gambut yang luas dan ketersediaan air yang banyak dapat mendukung kehidupan perkebunan kelapa sawit dan memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, biaya untuk pembukaan lahan dapat dibilang murah dengan menggunakan metode penebangan dan pembakaran hutan meskipun cara tersebut dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup. Faktor upah buruh yang rendah juga menjadi alasan MNC tertarik untuk melakukan produksi kelapa sawit di Kalimantan. Upah buruh yang rendah dapat meminimalisir biaya produksi sehingga keuntungan yang didapat lebih maksimal.

Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara massif akan mengakibatkan perubahan fungsi lahan dan mempengaruhi kualitas udara, terjadinya bencana alam, dan kemarau berkepanjangan. Hutan berfungsi sebagai penyimpan sumber daya alam genetik, penyimpan karbon, serta pengatur kesuburan tanah dan iklim. Degradasi hutan yang diakibatkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit tentu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Perluasan perkebunan kelapa sawit juga berdampak pada sosial budaya masyarakat sekitar. Seperti suku Dayak Muluy di Paser yang mulai kesulitan untuk mencari rotan dan tanaman obat di hutan. Hutan merupakan sumber hidup dan sumber pengetahuan lokal mengenai budaya pengobatan tradisional yang dijaga dari generasi ke generasi oleh masyarakat adat. Masyarakat adat juga kehilangan kendali terhadap tanah ulayat mereka. Pada tahun 1999, masyarakat di daerah Jempang, Bongan, dan Bongan mengeluhkan penghancuran kuburan nenek moyang mereka oleh perusahaan London Sumatera Plantation. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk melihat orientasi MNC dan dampak keterlibatan

MNC dalam perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi lingkungan hidup, sosial, serta budaya masyarakat sekitarnya.

Penelitian kelima ditulis oleh Rory Padfield, Simon Drew, Khadijah Syayuti, Susan Page, Stephanie Evers, Ahimsa Campos-Arceiz, Nagulendran Kangayatkarasu, Alex Sayok, Sune Hansen, Greetje Schouten, Martha Maulidia, Effie Papargyropoulou, dan Mun Hou Tham dengan judul *Landscapes in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry*.<sup>22</sup> Penelitian ini membahas tentang kebijakan Malaysia dan Indonesia menghadapi deforestasi akibat perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Selain kedua aktor negara tersebut, sebagai bentuk respon terhadap krisis kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, beberapa perusahaan mulai berkomitmen untuk tidak memperluas lahan perkebunan menggunakan metode pembakaran hutan. Perusahaan tersebut pada umumnya merupakan anggota dari RSPO. Pada tahun 2013, Wilmar International mengeluarkan kebijakan NDPE sebagai bentuk respon terhadap isu deforestasi dan eksploitasi tenaga kerja. Kebijakan tersebut menyangkut semua operasi dalam rantai produksi minyak kelapa sawit, serta menyangkut juga pihak-pihak yang bekerjasama dan menjadi pemasok Wilmar International. Sejak kebijakan tersebut dikeluarkan pada tahun 2013, lima produser minyak kelapa sawit terbesar di Asia Tenggara menyatakan akan mengikuti kebijakan yang telah dibentuk oleh Wilmar International. Komitmen dari beberapa perusahaan tersebut juga menyangkut kepentingan akses pasar terhadap Eropa dan Amerika Utara yang mengedepankan

---

<sup>22</sup> Rory Padfield, “*Landscapes in Transition: An Analysis of Sustainable Policy Initiatives and Emerging Corporate Commitments in The Palm Oil Industry*”, (Landscape Research Group, ISSN: 0142-6397, 2016), Hal. 3.

keberlangsungan lingkungan hidup dalam penyediaan pasokan minyak kelapa sawit. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mendeskripsikan korelasi antara lingkungan hidup, MNC, serta regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi akses pasar minyak kelapa sawit.

## 1.7. Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Environmental Non-Governmental Organization

Meskipun Non-Governmental Organization (NGO) lingkungan mempunyai tujuan yang sama dalam menjaga lingkungan dan memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan, mereka mempunyai filosofi, struktur, serta metode atau strategi yang berbeda. Konsep yang digunakan peneliti untuk menemukan upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi oleh Wilmar di Indonesia yaitu konsep Environmental NGO dari John McCormick. McCormick mendeskripsikan jenis-jenis filosofi, struktur, dan metode atau strategi NGO lingkungan sebagai berikut:

23

#### a. Filosofi NGO Lingkungan

Pembagian filosofi NGO Lingkungan didasari pada kondisi negara-negara di setiap belahan dunia yang mempunyai spesifikasi masalah masing-masing yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Perbedaan tersebut menghasilkan enam jenis spesifikasi filosofi sebagai berikut:

1) *Northern NGO* berfokus pada konsekuensi lingkungan dari perkembangan industri dan konsumerisme. Mereka berpendapat pasar bebas perlu

---

<sup>23</sup> John McCormick, "The Role of Environmental NGOs in International Regimes in The Global Institution, Law, and Policy", (Washington DC, CQ Press, 2010), Hal. 102.

dikekang melalui regulasi industri yang lebih besar sehingga dapat mengurangi sifat konsumerisme dan pengurangan polusi.<sup>24</sup>

2) *Southern NGO* berfokus pada konsekuensi lingkungan dari kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam sistem ekonomi global. Mereka berpendapat bahwa permasalahan lingkungan diakibatkan oleh kemiskinan, pergeseran industri pencemar dari utara ke selatan dalam upaya memenuhi tuntutan konsumen yang akhirnya menimbulkan kesenjangan ekonomi.<sup>25</sup>

3) *Conservative and pragmatism NGO* yang bekerja untuk mencapai perubahan dalam proses politik yang sudah mapan. NGO ini terdiri dari kelompok atau partai politik yang secara aktif ikut serta dalam proses politik dalam menentukan atau mempengaruhi kebijakan. NGO yang masuk dalam kategori ini seperti National Wildlife Federation, Sierra Club, dan National Audobon Society.<sup>26</sup>

4) *Green organization* yang mencari perubahan mendasar dalam hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kelompok organisasi hijau menolak nilai-nilai dominasi manusia terhadap alam yang menjadi dasar pembangunan dan memperdebatkan kebutuhan akan perubahan sosial untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Namun, juga terdapat kelompok hijau yang tidak mempertanyakan hal tersebut dan berfokus pada mengkritik struktur politik, konsumerisme, dan mengusulkan paradigma lingkungan baru. Di beberapa negara, pandangan ini digabungkan dengan gerakan *grassroot* hingga menghasilkan partai politik hijau.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> John McCormick, Hal. 101.

<sup>25</sup> John McCormick, Hal. 101.

<sup>26</sup> John McCormick, Hal. 103.

<sup>27</sup> John McCormick, Hal. 103.



5) *Radical organization* yang menggunakan konfrontasi dan tindakan langsung untuk menarik perhatian pada masalah lingkungan dan berpendapat bahwa proses politik konvensional adalah salah satu penyebab masalah lingkungan terus berlanjut. Konfrontasi dan tindakan langsung dibutuhkan untuk melakukan perubahan dalam politik dan ekonomi. Salah satu NGO yang tergolong dalam kategori ini yaitu Greenpeace yang sering melakukan konfrontasi tanpa kekerasan dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Taktik konfrontasi tersebut seperti mengganggu perburuan ikan paus, hingga aksi mengikat diri di jembatan sebagai bentuk penolakan terhadap pengiriman limbah nuklir.<sup>28</sup>

6) NGO yang mewakili pandangan suatu kelompok sosial ekonomi yang berkepentingan dengan perdebatan lingkungan seperti perempuan, minoritas, maupun bisnis.<sup>29</sup>

#### b. Struktur NGO Lingkungan

NGO lingkungan tidak hanya memiliki filosofi dan fokus isu yang berbeda, tapi juga terdapat perbedaan dalam struktur keanggotaannya. Perbedaan itu dapat berasal dari fokus isu, batas wilayah kepentingan, hingga struktur keanggotaan. John McCormick membagi struktur dari NGO lingkungan menjadi lima jenis, diantaranya:

1) *Federations of International and National Organizations*. Struktur ini terdiri dari badan-badan yang dibentuk untuk melakukan koordinasi dan kerjasama di antara badan-badan anggotanya. Badan-badan tersebut menjadi sebuah jaringan

---

<sup>28</sup> John McCormick, Hal. 103.

<sup>29</sup> John McCormick, Hal. 103.

global yang masing-masing memiliki kantor nasional di negara mereka sendiri. Struktur ini juga dapat berupa badan koordinator yang menyatukan berbagai organisasi. Salah satu NGO yang menggunakan struktur ini yaitu Greenpeace dan Friends of the Earth.<sup>30</sup>

2) *Universal Membership Organizations*. Keanggotaan struktur ini dapat terdiri dari gabungan antara pemerintah, badan pemerintah dan badan non-pemerintah yang berada di berbagai negara. Salah satu NGO yang menggunakan struktur ini yaitu International Union for Conservation of Nature yang terdiri dari 86 pemerintah, 120 badan pemerintah, dan 902 NGO nasional dan internasional.<sup>31</sup>

3) *Intercontinental Membership Organizations*. Struktur ini diisi oleh badan-badan yang kepentingannya melampaui wilayah tertentu dan mempunyai sebuah fokus isu yang ditangani. Keanggotaannya juga dapat terdiri dari gabungan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Struktur bisa dilihat pada Bird Life International yang berfokus pada mengumpulkan berbagai informasi dalam pembangunan badan yang kuat untuk melindungi burung dan habitat aslinya.<sup>32</sup>

4) *Regionally Defined Membership Organizations*. Keanggotaan dari struktur ini terdiri dari badan-badan yang kepentingannya terbatas pada satu benua tertentu.<sup>33</sup>

5) *Internationally Oriented National Organizations and National NGOs That Are Partly or Wholly Focused on International Issues*. Keanggotaan dari jenis NGO ini terdiri dari NGO nasional yang berfokus pada berbagai aspek

---

<sup>30</sup> John McCormick, Hal. 104.

<sup>31</sup> John McCormick, Hal. 104.

<sup>32</sup> John McCormick, Hal. 105.

<sup>33</sup> John McCormick, Hal. 105.

permasalahan terkait lingkungan, seperti hak asasi manusia, kebijakan perdagangan, pemanasan global, pertumbuhan populasi, dan isu lainnya.<sup>34</sup>

### c. Strategi NGO Lingkungan

NGO lingkungan mempunyai berbagai cara yang berbeda dalam mencapai kepentingannya dalam permasalahan lingkungan. John McCormick membagi strategi NGO lingkungan menjadi 9 macam, diantaranya:

1) *Working with elected officials, bureaucrats, and employees of corporations.* Bentuk dari strategi ini yaitu lobi yang dilakukan oleh NGO terhadap pemerintah. Lobi merupakan metode yang paling umum digunakan oleh NGO untuk membentuk kesepakatan sehingga kedepannya tidak diperlukan tindakan-tindakan yang dapat merusak citra pemerintah. Beberapa NGO besar juga membentuk komite aksi politik untuk memberikan dukungan dan informasi kepada partai politik tertentu, serta menyalurkan dana kepada partai politik atau kandidat yang didukung. NGO juga dapat mempengaruhi audiensi legislatif dan pengembangan perjanjian internasional dengan cara memberikan saran, kesaksian ahli, mengajukan proposal ke departemen pemerintah atau bekerjasama dengan komisi pemerintah.<sup>35</sup>

2) *Raising and spending money.* NGO dapat mengumpulkan dana melalui aksi kampanye nasional serta internasional hingga gerakan akar rumput. Dana yang dikumpulkan tersebut disalurkan untuk kegiatan konservasi dengan tujuan melindungi spesies hewan dan tumbuhan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> John McCormick, Hal. 105.

<sup>35</sup> John McCormick, Hal. 102.

<sup>36</sup> John McCormick, Hal. 102.

3) *Campaigning and organizing public protest.* NGO melakukan kampanye isu lingkungan dengan tujuan menciptakan pengetahuan dan kesadaran dari kalangan masyarakat tentang permasalahan yang sedang terjadi. Kesadaran tersebut akan memunculkan kepedulian dan simpati masyarakat yang dapat menghasilkan gerakan-gerakan protes dari masyarakat mengenai isu tersebut.<sup>37</sup>

4) *Promoting media coverage of environmental issues.* NGO melakukan penyediaan informasi melalui wawancara dengan suatu media. Melalui media tersebut, NGO dapat menyampaikan pesan mereka terhadap publik, memberikan legitimasi dan dukungan terhadap pekerjaan mereka, melakukan mobilisasi terhadap sekutu potensial, serta mempengaruhi pembuat kebijakan.<sup>38</sup>

5) *Litigation and monitoring the implementation of environmental law.* Sebagai aktor non-negara, NGO dapat melakukan litigasi dan pengawasan terhadap implementasi hukum lingkungan yang telah dibentuk oleh pembuat kebijakan. Metode ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan menuntut pihak swasta untuk memulihkan biaya hukum serta denda jika terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

6) *Information Exchange.* NGO melakukan penyebaran dan pertukaran informasi sebagai bentuk bantuan memperkuat gerakan kelompok lain dalam isu tertentu. Pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cara membentuk program pelatihan dan pendidikan, menyediakan bantuan teknis dalam bentuk sumber daya manusia, hingga mengkoordinasikan anggotanya untuk melakukan lobi dengan pemerintah.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> John McCormick, Hal. 102.

<sup>38</sup> John McCormick, Hal. 102.

<sup>39</sup> John McCormick, Hal. 102.

<sup>40</sup> John McCormick, Hal. 102.

7) *Undertaking research*. NGO melakukan penelitian ilmiah mengenai berbagai permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di wilayah tertentu.<sup>41</sup>

8) *Acquiring and managing property*. Melalui metode ini, NGO membeli tanah dan bangunan yang memiliki signifikansi historis untuk mereka kelola sendiri. NGO juga dapat membeli suatu tanah untuk membentuk habitat satwa liar.<sup>42</sup>

9) *Generating local community involvement in environmental protection*. Metode ini sering digunakan kepada kelompok masyarakat pedesaan dan perkotaan di negara-negara yang telah aktif melakukan gerakan. Metode ini bertujuan memobilisasi masyarakat untuk membentuk suatu gerakan demi mendukung tujuan-tujuan NGO tersebut.<sup>43</sup>

### 1.7.2 Multi-National Corporation (MNC)

Multi-National Corporation kadang juga dikenal dengan istilah *multinational enterprise, international corporation, dan transnational corporation*. Norbert Horn berpendapat MNC adalah perusahaan-perusahaan yang dikontrol dan dipimpin oleh *home country* atau negara asalnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi di dua atau lebih negara yang menjadi negara pemodal atau dikenal juga dengan istilah *host countries*. Keputusan-keputusan menyangkut aktivitas ekonomi di *host country* diputuskan di *home country* sebagai pemimpin perusahaan tersebut. Hans W. Baade juga menambahkan bahwa *home country*

---

<sup>41</sup> John McCormick, Hal. 102.

<sup>42</sup> John McCormick, Hal. 102.

<sup>43</sup> John McCormick, Hal. 102.

menjadi *central management* dari perusahaan tersebut dan dapat melakukan pengawasan atau *guiding direction* pada negara *host countries*.<sup>44</sup>

Sumantoro juga menambahkan bahwa terdapat beberapa bentuk badan hukum yang digunakan oleh MNC sebagai strukturnya, diantaranya:<sup>45</sup>

- 1) Perusahaan Cabang yang merupakan bagian dari perusahaan induk.
- 2) *Wholly Owned Subsidiary* atau dikenal juga dengan perusahaan *subsidiary* merupakan anak perusahaan yang memiliki badan hukum sendiri, namun saham dari anak perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk.
- 3) *Joint Venture* atau dikenal juga dengan perusahaan patungan merupakan perusahaan yang saham dari perusahaan tersebut dikuasai oleh dua atau lebih perusahaan lain sebagai partner.
- 4) Perusahaan lokal yang sebagian dari sahamnya dikuasai oleh masyarakat.
- 5) Bentuk perusahaan lainnya dalam bidang tertentu yang pembentukannya berdasarkan peraturan yang ada, seperti bidang perdagangan barang atau jasa, perbankan, dan lain-lain.

## 1.8. Metodologi

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif sebagai bentuk pemaparan data-data yang didapatkan dalam bentuk tulisan ilmiah dan

---

<sup>44</sup> Marcel Hendrapati, "Perusahaan Transnasional dan Implikasinya dalam Hukum Nasional Indonesia", (Era Hukum, No. 3, Th. 1, 1995), Hal. 81.

<sup>45</sup> Sumantoro, "Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problematika Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional", (Jakarta, Gramedia, 1987), Hal. 45.

pendeskripsian fakta aktual yang tergambar dari hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis analisa deskriptif yang mengacu pada pengumpulan data dari situs resmi Greenpeace dan Wilmar International, laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan Indonesia dan upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International. Penulis memaparkan interpretasi data-data yang didapat dari penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel, website yang membahas mengenai objek penelitian dan menghubungkan data tersebut dengan data lainnya serta pemilihan sumber yang dianggap paling relevan sehingga menghasilkan argumen atau tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Agar pembahasan tidak melebar, penulis mencoba memberi batasan penelitian yaitu semenjak tahun 2012, dimana pada tahun ini Indonesia pertama kali menjadi negara terbesar dalam ekspor minyak kelapa sawit yang menjadi salah satu faktor utama deforestasi dan satu tahun sebelum Wilmar International mengeluarkan kebijakan NDPE. Hingga tahun 2019, dimana satu tahun sebelumnya Greenpeace melaporkan bahwa Gama yang merupakan perusahaan minyak kelapa sawit yang dijalankan oleh eksekutif Wilmar International telah menghancurkan hutan di Indonesia untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan permasalahan deforestasi tersebut masih berlanjut hingga sekarang.

### **1.8.3 Tingkat dan Unit Analisis**

Dalam penelitian, dibutuhkan suatu pemahaman tentang tingkat dan unit analisis guna membantu peneliti dalam menyederhanakan objek yang akan diteliti.

Tingkat analisis dari penelitian ini yaitu negara. Unit analisis dipahami sebagai bagian yang akan diteliti dan dideskripsikan. Pada penulisan ini, unit analisis yang digunakan adalah Greenpeace. Sedangkan unit eksplanasi penelitian ini adalah upaya menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan dengan melakukan pencarian, penelusuran, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Teknik dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dimana pengumpulan data dilakukan berdasarkan literature reviews. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder (*secondary data*) yang berasal dari dokumentasi dan publikasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain terlebih dahulu. Data-data tersebut berupa artikel yang ditulis oleh Retno Kusumaningtyas, Jan Willem van Gelder, Wirendro Sumargo, Muhammad Arief Virgy, Bella Putri, Muhammad Risal, Rory Padfield, dan jurnal lain terkait penulisan penelitian ini. Serta artikel yang relevan pada objek penelitian, maupun laporan dari instansi terkait seperti laporan Wilmar International, laporan Greenpeace, dan data dari Badan Statistik Indonesia. Selain itu, penulis juga memanfaatkan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sementara keyword yang akan digunakan adalah deforestasi, Indonesia, Greenpeace, dan Non Governmental Organization.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**



Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan melakukan beberapa tahap. Pertama adalah tahap pengelompokan data. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Awalnya peneliti mengumpulkan data terkait deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International, kemudian bagaimana Greenpeace menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International. Kedua adalah tahap reduksi data. Dalam tahap ini peneliti melakukan penyeleksian terhadap data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang akan dianalisis agar dapat membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Ketiga adalah tahap interpretasi dan penyajian data. Data-data yang telah diseleksi akan diinterpretasikan dan disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual *Environmental NGO* dan *Multinational Corporation*. Terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International.

## **1.9.Sistematika Penulisan**

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, pengolahan data, dan sistematika penulisan.

### **Bab II: Greenpeace Sebagai Environmental Non-Governmental Organization**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan Greenpeace sebagai organisasi lingkungan menggunakan konsep *Environmental* NGO. Peneliti memaparkan sejarah terbentuknya Greenpeace, profil Greenpeace, tujuan dan prinsip – prinsip Greenpeace, struktur organisasi Greenpeace, serta keberhasilan Greenpeace di Indonesia.

### **Bab III: Keterlibatan Wilmar International dalam Deforestasi di Indonesia**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang Wilmar International menggunakan konsep *Multinational Corporation* dimulai dari *home dan host countries*, model bisnis, komoditas, dan struktur Wilmar. Bab ini juga memaparkan kebijakan NDPE yang dikeluarkan Wilmar dan keterlibatan Wilmar dalam deforestasi di Indonesia setelah mengeluarkan kebijakan tersebut.

### **Bab IV: Strategi Greenpeace Menghadapi Deforestasi dalam Rantai Pasok Wilmar International**

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis apa saja strategi Greenpeace menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International dengan menggunakan konsep *Environmental* NGO.

### **Bab V: Kesimpulan**

Pada bab ini, peneliti akan menuliskan kesimpulan dan hasil dari penelitian beserta saran.